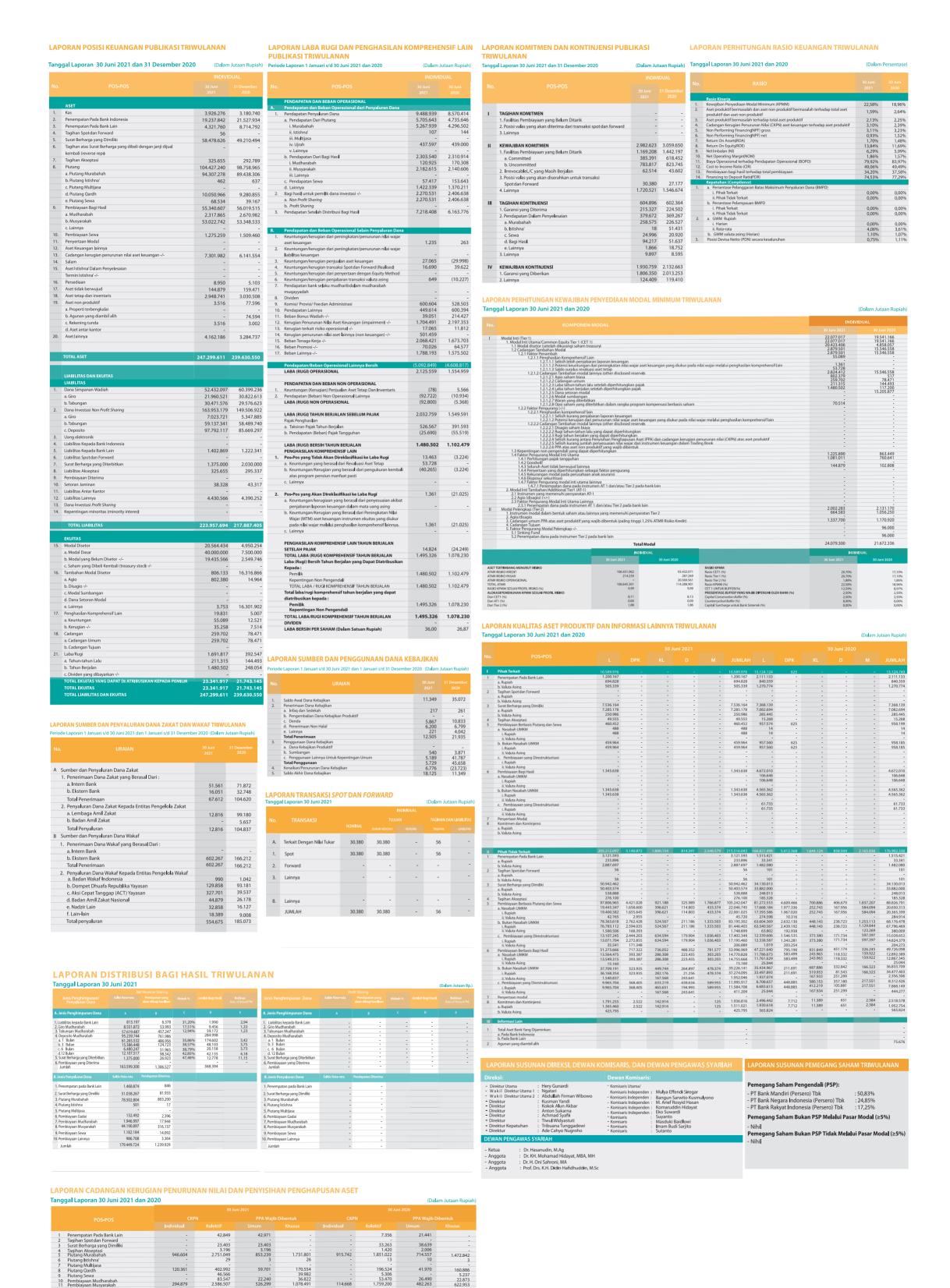


22.240 526.299

26.490 482.263

114.668



LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN INDUK

Internasional

WTO Gagal Sepakati Penangguhan Paten

Besarnya defisit vaksin Covid-19 masih akan berlanjut. Organisasi Perdagangan Dunia yang diharapkan bisa menyepakati penangguhan hak paten lagi-lagi gagal. Di tengah situasi darurat, sejumlah negara masih menolak skema itu.

GENEVA, KAMIS - Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO lagi-lagi gagal menyetujui usulan penangguhan hak atas kekayaan intelektual vaksin Covid-19. Padahal, penangguhan hak paten menjadi dasar percepatan pengadaan vaksin Covid-19 ketika dunia masih sangat kekurangan pasokan.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PERUSAHAAN INDUK

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERUSAHAAN INDUK

Penangguhan hak paten vaksin Covid-19 diusulkan oleh India dan Afrika Selatan di WTO per Oktober 2020. Sampai saat ini atau sembilan bulan berjalan, 164 negara anggota tidak kunjung mencapai konsensus, termasuk pada pertemuan terakhir di Geneva, Swiss, Rabu (28/7/2021).

Juru bicara WTO, Keith Rockwell, mengatakan, negara anggota akan mengadakan pertemuan informal untuk membahas situasi terkini pada September mendatang. Pertemuan formal akan digelar pada 13-14 Oktober 2021.

"Isu ini akan dibahas terus karena ini isu yang sangat penting dan emosional," kata Rockwell setelah pertemuan Dewan Umum WTO hari pertama, Rabu.

Menurut Rockwell, semua negara pada dasarnya sepaham mengenai perlunya segera meningkatkan produksi vaksin Covid-19. Namun, belum ada kesepakatan mengenai cara terbaik untuk meningkatkan produksi itu.

Senegal, Bangladesh, India, Afrika Selatan, Thailand, Maroko, dan Mesir dinilai mampu memproduksi vaksin Covid-19. Namun, mereka membutuhkan pengetahuan dan teknologi untuk produksi.

Perdebatan yang terjadi di dalam pertemuan itu berfokus pada perjanjian WTO mengenai Aspek-aspek Terkait Perdagangan dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),

klik.kompas.id/internasional



Baca artikel lainnya seputar Internasional di Kompas.id dengan

serta ketentuan yang berkaitan dengan tindakan medis untuk pencegahan, menahan penyebaran, atau alat perawatan kesehatan yang dibutuhkan un-

Kamis (29/7/2021).

tuk melawan Covid-19.

Perjanjian TRIPS merupakan perjanjian yang menetapkan standar minimal untuk regulasi tentang HaKI di negara-negara anggota WTO. Perjanjian yang awalnya diusulkan Amerika Serikat pada 1994 dan ditentang India ini berlaku sejak 1995. Sifatnya mengikat bagi seluruh anggota WTO.

Mendesak

Meningkatnya kasus Covid-19 dan mendesaknya akses vaksin dan obat-obatan membuat India dan Afrika Selatan mengusulkan penangguhan HaKI pada Oktober 2020. Inisiatif ini mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang, serta AS dan China.

Proposal ini menekankan permintaan penangguhan ketentuan tertentu, seperti HaKI atau paten, rahasia dagang, dan desain industri yang diatur dalam Perjanjian TRIPS. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanganan, pencegahan, dan

pengobatan Covid-19. Negara-negara yang menen-

Ratusan orang mengantre untuk menerima vaksin Covid-19 dosis kedua di Hyderabad, India,

tang proposal ini adalah negara-negara di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Keberatan mereka terletak pada poin durasi penangguhan, serta ruang lingkup dalam artian cakupan produk dan ketentuan TRIPS. Poin lainnya adalah implementasi dan perlindungan terhadap informasi-informasi rahasia.

Proposal ini juga mendapat penolakan keras dari perusahaan-perusahaan farmasi raksasa. Mereka bersikeras hak paten bukanlah penghalang utama dalam peningkatan produksi vaksin Covid-19. Mereka memperingatkan proposal itu justru akan menghambat ino-

Sementara para pendukung proposal itu menilai bahwa masalah mendasar minimnya pasokan vaksin dan obat-obatan penunjangnya terletak pada hak patennya. Sejauh ini, pasokan masih amat terbatas karena produksi hanya dilakukan perusahaan-perusahaan pemegang hak paten atau perusahaan yang bekerja sama dengan para pe-

megang hak paten. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, dalam harian Bloomberg, Rabu (28/7), berpendapat, negara-negara di Afrika harus bisa membangun kapasitas untuk memproduksi vaksin guna kebutuhan Afrika. Negara-negara Afrika sekaligus harus bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi demi memastikan ketersediaan bahan baku.

Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung proposal India. "Indonesia juga mendukung penghapusan hak paten vaksin Covid-19 guna mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. Ini adalah salah satu bentuk upaya kolaborasi dunia untuk meratakan jalan bagi akses vaksin setara bagi semua," kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi, 8 Mei 2021.

Total kebutuhan vaksin Covid-19 dunia sekitar 14,2 miliar dosis. Sampai saat ini, baru 3,93 miliar dosis vaksin Covid-19 yang sudah didistribusikan ke seluruh dunia. Hanya sekitar 0,3 persen di antaranya diberikan pada penduduk di 29 negara berpendapatan terendah yang merupakan 9 persen dari total populasi dunia. (AFP/LUK)

*) Saldo konsolidasian termasuk dana syirkah temporer dari Entitas Anal

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PERUSAHAAN INDUK

1.510.384 1.246.840



DIPLOMASI

AS Tak Meminta Asia Tenggara Berpihak

HANOI, KAMIS — Menteri Pertahanan Amerika Serikat Llovd Austin berusaha meyakinkan Asia Tenggara bahwa negara di kawasan itu tidak harus memilih untuk berpihak kepada AS atau China. Meski demikian, Washington berjanji mendukung kawasan tersebut jika harus menghadapi klaim tidak berdasar dari negara di luar Asia Tenggara.

Austin menyampaikan hal itu sebelum dijamu Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang, Kamis (29/7/2021), di Hanoi, Vietnam. Hal senada disampaikan Austin di Singapura pada Selasa malam. "Tujuan utama kami adalah memastikan sekutu dan mitra bebas menentukan masa depannya," kata Austin di Vietnam, Kamis.

Pernyataan tersebut diungkapkan di tengah ketegangan AS-China di Asia Tenggara dan berbagai kawasan lain. Di Asia Tenggara, ada kecemasan bahwa Beijing atau Washington memaksa negara-negara di kawasan itu untuk memihak salah satu di antara mereka dalam persaingan kedua kekuatan besar tersebut.

"Seperti disampaikan Perdana Menteri Lee, kami tidak meminta negara di kawasan untuk memilih antara AS dan China. Faktanya, banyak kemitraan kami di kawasan lebih lama dibandingkan (kemitraan) China (dengan negara kawasan)," ujar Austin di Singapura.

Austin merujuk pada keresahan yang dilontarkan PM Singapura Lee Hsien Loong beberapa tahun lalu. Lee pernah mengungkap kegelisahan atas AS, terutama pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, yang dinilai tidak mau hadir di kawasan.

Diplomat senior Singapura,

Kishore Mahbubani, beberapa waktu lalu juga mengungkap kecemasan atas diplomasi AS di Asia. Ia khawatir AS berusaha menggalang aliansi militer di Asia, seperti yang dibangun di Eropa dalam bentuk Pakta Per-Atlantik Utara tahanan (NATO). ASEAN dengan cemas mengikuti fakta pemerintahan Joe Biden mendorong aliansi India-Jepang-Korea Selatan-Australia atau Quad dengan tujuan menghadapi China.

Tak akan memihak

ASEAN berulang kali menyatakan tidak akan berpihak pada kekuatan besar. Hal itu berlaku untuk AS, China, Jepang, hingga Rusia. Bagi ASEAN, siapa pun yang masuk kawasan harus ikut mekanisme ASEAN dan menjunjung sentralitas ASEAN.

ASEAN tidak ingin melihat persaingan AS-China di Asia Tenggara. Setiap anggota ASEAN berkepentingan untuk berhubungan baik dengan AS, China, dan negara lain. ASEAN sangat tidak mengharapkan pemerintahan Biden mengulangi retorika pemerintahan Trump.

Austin mengatakan, ASEAN amat penting bagi kawasan. ASEAN berperan mengeratkan kawasan. "Menawarkan (kesempatan) bersuara bagi semua pihak dan membangun kebiasaan kerja sama," katanya.

Secara khusus, Austin menunjuk Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN dan para mitra (ADMM) sebagai pelantar penting kerja sama di kawasan. "Tempat yang semakin penting bagi arsitektur keamanan kawasan," ujarnya.

Austin juga menyebut, ASEAN menunjukkan kemampuan memimpin dalam isu-isu penting kawasan.

(AFP/REUTERS/RAZ)

KILAS LUAR NEGERI

Hapus Konten Rasis, Facebook Disalahkan

Pengadilan Federal di Jerman memutuskan Facebook bertindak ilegal dalam menghapus unggahan bernada rasis dan memblokir akun penulisnya. Dalam ringkasan tiga halamannya, pengadilan menyatakan bahwa persyaratan layanan Facebook soal penghapusan unggahan dan pemblokiran akun karena melanggar standar komunitas adalah batal demi hukum. Hakim menilai Facebook gagal memberi tahu pengguna atau memberikan alasan kebijakannya tersebut. Keputusan yang dijatuhkan pada Kamis (29/7/2021) ini mengejutkan karena komentar rasis yang dibuat oleh penggugat yang tidak disebutkan namanya itu melanggar standar komunitas Facebook tentang ujaran kebencian sekaligus hukum positif di Jerman sendiri. (REUTERS/LAS)

KILASAN KAWAT SEDUNIA



London

Seorang anggota sindikat internasional, Lulu Lakatos (60), dijatuhi hukuman penjara 5,5 tahun oleh Pengadilan Southwark Crown di London, Inggris, Rabu (28/7/2021). Dia diputus bersalah karena terbukti mencuri berlian senilai 5,7 juta dollar AS dari sebuah toko perhiasan di London, 10 Maret 2016. Selanjutnya, Lulu melarikan diri ke Perancis sebelum akhirnya tertangkap. Menurut polisi, Lulu berpura-pura menjadi utusan investor kaya Rusia yang berniat



membeli tujuh butir berlian. Setelah Lulu memeriksa berlian, pegawai toko lalu membungkus dan menempatkannya dalam tas terkunci yang kemudian disimpan di lemari besi sampai pembayaran diterima. Para pegawai toko terkejut saat mendapati tujuh kerikil dalam bungkusan. Merujuk video kamera keamanan, pelaku menukar tas berisi berlian dengan tas serupa berisi kerikil. Ini dilakukan dengan mengalihkan perhatian pegawai toko. (AP/BEN)

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 🔐 dan merupakan Peserta Penjaminan 📀 🚟

Bank Syariah Indonesia Call 14040

www.bankbsi.co.id